

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DI KECAMATAN SUMEDANG SELATAN**

FEPI FEBIANTI

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang

Email: fepifebianti@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the problem: Community Participation in Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) payments in South Sumedang District. The method used in the preparation of this proposal is a Qualitative Research Method, with an independent variable namely Community Participation. The informants were as many as 4 people, namely the sub-district head, the head of the governance section, the UN collector, and the village head. Based on the results of interviews and data analysis, it was concluded that community participation in the payment of land and building taxes in rural and urban sectors in South Sumedang District can be said to be quite good. Constraints contained in the Land and Building Tax Payment in rural and urban sectors in the Sumedang Selatan Subdistrict are weak personal awareness, lack of information, lack of free time, and economic capacity of the community. Efforts to overcome these problems are conducting intensive socialization to the public, and the existence of clarity of information by providing online services.

Keywords: Community Participation

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, hasil dari pajak daerah merupakan sebagian sumber dari pendapatan asli daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah otonom atau daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dari pajak daerah Jenis pajak kabupaten/kota tersebut Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau

memperoleh manfaat dari padanya. Pajak bumi dan bangunan di daerah pengelolaannya merupakan bagian dari Dinas Pendapatan Daerah, tetapi sejalan dengan tercapainya target realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) setiap tahunnya, maka pemerintah kabupaten membuat kebijakan diadakannya kolektor ditiap kecamatan yang selanjutnya di teruskan oleh kolektor-kolektor kelurahan/desa, karena menurut pendapat Djaenuri (2012: 11) pengelolaan keuangan daerah yang baik harus berlandaskannya pada prinsip keterbukaan akuntabilitas, responsibilitas, dan penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pencapaian *good governance*, dampak positif lainnya yang terjadi adalah kebutuhan masyarakat akan penyediaan infrastruktur pada daerah tersebut akan lebih terpenuhi karena pembiayaan pembangunan yang tidak terhambat dan nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

. Pajak bumi dan bangunan juga memperkuat peranan pemerintah karena

membuka peluang dasar pajak yang lebih luas bagi penerimaan pemerintah sendiri. Pajak bumi dan bangunan yang efektif akan menciptakan penerimaan yang kuat bagi pemerintah daerah dan memperkecil kebutuhan akan bantuan dari pemerintah pusat. PBB tidak hanya memfokuskan pada peningkatan penerimaan tetapi mempunyai banyak fungsi lainnya, dengan demikian eksistensi PBB tidak hanya penting sebagai sumber penerimaan daerah tetapi juga strategis pengaruhnya terhadap berbagai aspek kegiatan dan kehidupan masyarakat. Seperti di ketahui hampir semua kegiatan manusia berlangsung di atas bumi dan terkait dengan persoalan bumi dan bangunan, oleh karena itu segala sesuatu yang berkenaan dengannya sangat sensitif bagi masyarakat.

Di wilayah Kecamatan Sumedang Selatan pemungutan pajak bumi dan bangunan masih belum baik. Hal tersebut terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Realisasi Pajak PBB-P2

Sumber: Data Kecamatan Sumedang Selatan

Dari 10 desa dan 4 kelurahan di wilayah Kecamatan Sumedang Selatan, hanya 3 desa/ kelurahan yang mencapai Target Realisasi pembayaran PBB-P2 sisanya banyak Kelurahan/desa yang belum memenuhi realisasinya, diperkirakan faktor-faktor yang menghambat dalam membayar pajak sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat sehingga menyebabkan pembayaran pajak tidak berjalan dengan efektif yang otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan maupun pengelolaan pajak nantinya.
2. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah dalam hal pengelolaan pajak.

3. Banyak masyarakat yang belum paham uang dari hasil pajak dipakai untuk apa dan masih belum mengetahui tentang cara pengelolaan maupun pembayaran PBB-P2 tersebut.
4. Disebagian wilayah desa ada pemungutan tambahan berupa uang pancen yang otomatis semakin memberatkan masyarakat dalam membayar pajak.
5. Masih sulitnya untuk melakukan pelaporan pajak.
6. Banyaknya Masyarakat yang meninggalkan daerah sehingga menjadikan pihak pemerintahan sulit bertemu untuk proses penagihan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *"Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan*

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Desa Baginda	79%	77%	72%	81%
2	Desa Gunasari	82%	79%	77%	75%
3	Desa Cipancar	85%	77%	83%	86%
4	Desa Citengah	77%	83%	79%	82%
5	Desa Ciherang	79%	77%	78%	75%
6	Kelurahan Kota Kulon	100%	100%	100%	100%
7	Desa Margamekar	84%	79%	77%	75%
8	Kelurahan Regol Wetan	100%	100%	100%	100%
9	Desa Sukagalih	80%	84%	82%	85%
10	Kelurahan Pasanggrahan Baru	81%	79%	77%	75%
11	Desa Sukajava	95%	100%	97%	96%
12	Kelurahan Cipameungpeuk	94%	89%	100%	95%
13	Desa Mekar Rahayu	93%	88%	97%	96%
14	Desa Margalaksana	100%	100%	100%	100%

Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Sumedang Selatan".

Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis fokus kepada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan

- Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Sumedang Selatan?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Sumedang Selatan?
 3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Sumedang Selatan?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Sumedang Selatan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Sumedang Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Sumedang Selatan.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep-konsep dan teori-teori Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen Pemerintahan yang dapat dijadikan sebagai acuan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor

perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Sumedang Selatan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam memecahkan masalah bagi objek penelitian dan bagi semua pihak yang terlibat langsung dalam hal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Sumedang Selatan.

PEMBAHASAN

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan. Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Pidarta (dalam Dwiningrum, 2011:50), partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Adapun pengertian partisipasi masyarakat menurut beberapa ahli, diantaranya:

Paul yang dikutip Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007: 114) memberikan pengertian partisipasi masyarakat sebagai berikut:

'...participation refers to an active process where by beneficiaries influence the direction and execution of development projects rather than merely receive a share of project benefits'.

(...partisipasi mengacu pada suatu proses aktif yang mana penerima hasil mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan pembangunan dibanding

dengan yang menerima suatu manfaat proyek).

Definisi Paul tersebut melihat keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmat hasil, dan evaluasi. Partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapi serta berupaya mencari jalan keluarnya. Partisipasi juga membantu masyarakat untuk melihat realitas sosial ekonomi yang mengelilinginya.

Pendapat lain dikemukakan Iskandar (2001: 208) bahwa "Partisipasi masyarakat adalah kebersamaan atau saling memeberikan sumbangan akan kepentingan dan masalah-masalah bersama, yang tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu warga masyarakat itu sendiri".

Kemudian Isbandi (2007: 27) mengemukakan bahwa "Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi".

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses dan masalah- masalah bersama dari mulai perencanaan sampai dengan evaluasi.

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011: 51) membedakan partisipasi masyarakat kedalam empat jenis, antara lain:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang

menyangkut kepentingan bersama. partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut serta menentukan arah dan orientasi pembangunan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri. Ada 4 indikator dalam partisipasi dalam pelaksanaan, antara lain: keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi, kesediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian, kesediaan memberikan sumbangan uang atau materi, dan tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
Partisipasi ini tidak lepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar presentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Partisipasi dalam evaluasi
Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang

ditetapkan atau ada penyimpangan.

Faktor Penghambat dan Upaya Partisipasi Masyarakat

Slamet (dalam Theresia, 2014: 2017) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

1. Kesempatan masyarakat berpartisipasi
2. Kemauan masyarakat berpartisipasi
3. Kemampuan masyarakat berpartisipasi

Ketiga unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesempatan masyarakat berpartisipasi Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, system nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi masyarakat. Dalam kenyataannya, banyak program pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan masyarakat untuk berpartisipasi. Di lain pihak, sering dirasakan tentang kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau dituntut untuk berpartisipasi.

Pemerintah melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan suatu daerah, apabila dalam pembangunan tidak ada partisipasi masyarakatnya maka pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar dan optimal. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dengan masyarakat melibatkan diri dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kemauan masyarakat berpartisipasi Secara psikologid kemauan berpartisipasi muncul oleh adanya motif intrinsik (dari dalam diri sendiri) maupun ekstrinsik (ransangan, dorongan, atau tekanan dari pihak luar). Demikian pula dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, masyarakat harus memiliki kemauan yang kuat sehingga terdorong untuk melibatkan diri atau mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Kemampuan masyarakat berpartisipasi

Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan atau ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tidak akan banyak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Kemampuan berpartisipasi dapat dilihat dari bagaimana masyarakat merespon sosialisasi dan menerima informasi yang diberikan. Selain kemampuan, konsekuensi tingkat pendidikan yang memadai harus dimiliki oleh masyarakat karena dengan pendidikan akan turut menciptakan kelancaran dalam proses peningkatan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan faktor penghambat yang telah diuraikan diatas, maka upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengacu kepada konsep teori menurut Slamet (dalam Theresia, 2014:2017) sebagaimana disebutkan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Kesempatan untuk berpartisipasi Adanya keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi, tidak lepas dari adanya informasi yang diberikan oleh petugas terkait (dalam hal ini petugas kecamatan yang memegang kendali atas Pajak

Bumi dan Bangunan). Dengan dilakukannya pemberian informasi secara berkesinambungan akan memberikan pengetahuan tentang peran Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menggugah masyarakat untuk lebih menyadari akan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk ikut mensukseskan program pemerintah salah satunya dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kemauan untuk berpartisipasi
Meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk dan cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan melalui media-media lain yang lebih diketahui oleh masyarakat. Dengan dilakukannya sosialisasi, diharapkan masyarakat terdorong atau tergerak untuk ikut andil dalam proses berpartisipasi.
3. Kemampuan untuk berpartisipasi
Dalam hal ini tidak hanya kemampuan, tetapi juga pendidikan yang memadai harus dimiliki oleh masyarakat karena dengan kemampuan dan pendidikan akan turut menciptakan kelancaran dalam proses peningkatan partisipasi masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek/subjek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Nawawi dan Hadari (2005: 67) memberikan pendapat tentang metode deskriptif sebagai berikut:

Metode deskriptif adalah prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.

Peneliti menggunakan pendekatan induktif, Nasir (1988:202), memberikan pendapat sebagai berikut: "Pendekatan induktif adalah cara berfikir untuk memberi alasan dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum".

Sasaran Penelitian

Penentuan sasaran dalam suatu penelitian berkaitan dengan populasi dan sampel, namun dalam metode penelitian kualitatif, istilah populasi tersebut tidak digunakan melainkan dengan menggunakan istilah *social situation* yang mencakup tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi. Hal ini didasarkan pada

pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010:49) sebagai berikut: "Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan *social situation* yang terdiri atas tiga elemen, yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi".

Sedangkan sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang yang berjumlah 18 orang dan Kepala Desa/Lurah yang berada di lingkungan Kecamatan Sumedang Selatan yang berjumlah 14 orang.

Informan Penelitian

Pada penelitian ini penentuan informan yang menjadi sumber data

dilakukan dengan teknik sampling bertujuan (*purposive sampling*), menurut Sugiyono (2010:124) yaitu sebagai berikut: *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun daftar informan sebagai berikut:

No	Unsur	Jumlah (Orang)
1.	Camat Kecamatan Sumedang Selatan	1
2.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sumedang Selatan	1
3.	Kolektor PBB Kecamatan Sumedang Selatan	1
4.	Kepala Desa/Lurah	1
Jumlah		4

HASIL PEMBAHASAN

Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Sumedang Selatan

Fokus Permasalahan	Fokus Teori	Kesimpulan
Partisipasi Masyarakat Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011: 51)	Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan	Belum Sepenuhnya Baik Dalam hal memeriksa objek sudah baik, namun dari segi terlibat dalam proses masih kurang baik disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak.
	Partisipasi dalam pelaksanaan	Kurang Baik Dalam hal tepat waktu masih kurang baik dikarenakan oleh lemahnya antusias masyarakat dalam melakukan pembayaran

		pajak. Dalam hal kesesuaian objek kurang baik dikarenakan masih adanya masyarakat yang melakukan pembayaran tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
	Partisipasi dalam pemanfaatan hasil	Cukup Baik Dari segi menikmati hasil sudah sangat baik yaitu pembangunan yang merata. Namun, dari segi memahami objek kurang baik dikarenakan masyarakat kurang mengetahui mekanisme yang ada.
	Partisipasi dalam evaluasi	Sudah Baik Dari segi mengawasi objek sudah sangat baik yaitu adanya keleluasaan dalam hal pengawasan. Dari segi memberikan masukan sudah baik dikarenakan masyarakat dapat memberikan masukan atau saran untuk kemajuan pelaksanaan pajak.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa fokus permasalahan tentang **“Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

di Kecamatan Sumedang Selatan” dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Sumedang Selatan sudah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih perlu penyempurnaan dari segi terlibat dalam proses, tepat waktu, kesesuaian objek, dan memahami objek.

Apabila dilihat dari teori Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011: 51) membedakan partisipasi masyarakat kedalam empat jenis, antara lain:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
 - a. Terlibat dalam proses
 - b. Memeriksa Objek

- a. Memahami Objek
 - b. Menikmati Hasil Dari Objek
4. Partisipasi dalam evaluasi
 - a. Mengawasi Objek
 - b. Memberikan Masukan

Dari 4 (Empat) dimensi tersebut, Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya mampu menerapkan indikator-indikator seperti terlibat dalam proses, tepat waktu, kesesuaian objek, dan memahami objek sehingga masih perlu pembinaan dari pemerintah kepada masyarakat, khususnya wajib pajak agar partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak PBB-P2 ini dapat lebih ditingkatkan lagi.

Fokus Permasalahan	Fokus Teori	Kesimpulan
Slamet (dalam Theresia, 2015: 2017)	Kesempatan masyarakat berpartisipasi	Terdapat beberapa hambatan yaitu: Lemahnya kesadaran pribadi sehingga sengaja tidak membayar pajak PBB-P2. Kurangunya informasi yang di dapat oleh masyarakat dalam pelaksanaan PBB-P2 dikarenakan akses yang sulit.
	Kemauan masyarakat berpartisipasi	Tidak terdapat hambatan.
	Kemampuan masyarakat berpartisipasi	Terdapat beberapa hambatan yaitu: Kurangunya waktu luang masyarakat sehingga tidak ada waktu untuk melakukan pembayaran pajak PBB-P2. Kemampuan ekonomi masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak PBB-P2 kurang baik.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan
 - a. Tepat Waktu
 - b. Kesesuaian Objek
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

**Rekapitulasi Hambatan dalam
Pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan
dan Perkotaan
di Kecamatan Sumedang Selatan**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa fokus permasalahan tentang “Hambatan apa saja yang dihadapi dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

sektor perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Sumedang Selatan” dapat disimpulkan bahwa dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang masih terdapat beberapa hambatan yaitu dalam hal lemahnya kesadaran pribadi, informasi yang tidak menyeluruh, ketersediaan waktu luang, dan kemampuan ekonomi.

Rekapitulasi upaya dalam mengatasi permasalahan dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Sumedang Selatan

Fokus Permasalahan	Fokus Teori	Kesimpulan
Slamet (dalam Theresia, 2015: 2017)	Kesempatan masyarakat berpartisipasi	Tidak ada upaya yang dilakukan dikarenakan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi sudah tergolong baik.
	Kemauan masyarakat berpartisipasi	Upaya yang harus dilakukan yaitu: Melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Adanya kejelasan informasi dengan cara menyediakan pelayanan online.
	Kemampuan masyarakat berpartisipasi	Tidak ada upaya yang dilakukan dikarenakan kemampuan partisipasi masyarakat sudah cukup baik.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa

fokus permasalahan tentang “Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Sumedang Selatan” dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Sumedang Selatan adalah disediakannya sarana pembayaran elektronik, anggaran dan pemeliharaan fasilitas kerja melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, dan harus adanya kejelasan informasi dengan cara menyediakan pelayanan online.

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Sumedang Selatan dapat dikatakan belum baik.
2. Masih terdapat hambatan dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Sumedang Selatan yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada dimensi kesempatan berpartisipasi yaitu:
 - 1) Lemahnya kesadaran pribadi sehingga sengaja tidak membayar pajak PBB-P2. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak.
 - 2) Kurangnya informasi yang di dapat oleh masyarakat dalam pelaksanaan PBB-P2 dikarenakan akses yang sulit. Hal tersebut disebabkan oleh

- kurang baiknya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pajak PBB-P2.
- b. Pada dimensi kemampuan berpartisipasi terdapat beberapa hambatan yaitu:
- 1) Kurangnya waktu luang masyarakat sehingga tidak ada waktu untuk melakukan pembayaran pajak PBB-P2. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya antusias masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.
 - 2) Kemampuan ekonomi masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak PBB-P2 kurang baik. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami mekanisme pelaksanaan pajak PBB-P2.
3. Upaya mengatasi permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Sumedang Selatan yaitu sebagai berikut:
- a. Pada dimensi kemauan masyarakat berpartisipasi, harus ada upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan, diantaranya:
- 1) Melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat.
 - 2) Adanya kejelasan informasi dengan cara menyediakan pelayanan online.
2. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak PBB-P2 harus ditingkatkan lagi yaitu dengan cara memberikan sosialisasi dan penyuluhan yang intensif.
 3. Dalam hal kesempatan masyarakat berpartisipasi, perlu disediakan pelayanan informasi melalui media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi rukminto. 2007. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Al Fatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. ed. Rev. IV. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1985. *Administrasi dan Management Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Made Pirdata. 1990. *Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan system*. (Jakarta cipta, 1990) hal.53
- Nawawi, H. Hadari. 1983. *Metode Penelitian Deskriptif*. Gajah Mada University Press.

Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kemauan masyarakat berpartisipasi dalam pembayaran pajak PBB-P2 yaitu dengan cara menyediakan sarana pembayaran pajak berbasis elektronik.

Yogyakarta

Siti Ireneu Dwiningrum. *Desentralisasi Masyarakat dan Partisipasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2014.
Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta

Theresia, Aprilia, Krisnha Andini, Prima Nugraha, Totok Mardikanto.
(2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta, Bandung